

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

1. Bagaimana latar belakang munculnya kebijakan/peraturan daerah penyelenggaraan reklame dan media informasi?
2. Bagaimana kesiapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai pelaksana penyelenggaraan reklame dan media informasi?
3. Kapankah penetapan/pelaksana penyelenggaraan reklame dan media informasi?
4. Bagaimana kejelasan terkait tujuan dari kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi?
5. Bagaimana kejelasan terkait sasaran dari kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi?
6. Bagaimana terkait standar pelayanan dalam hal penyelenggaraan reklame dan media informasi?
7. Apa saja bentuk dan jenis yang dikategorikan termasuk kedalam penyelenggaraan reklame dan media informasi?
8. Bagaimana prosedur-prosedur yang dilalui dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi?
9. Apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi?
 - a. Pembuatan izin reklame dan media informasi?
 - b. Perpanjangan izin reklame dan media informasi?

10. Bagaimana terkait Standar Operasional Prosedur(SOP)?
11. Bagaimana terkait biaya/retribusinya?
12. Bagaimana dengan komunikasi yang dilakukan?
 - a. Komunikasi terhadap kosumen(yang mengurus izin)?
 - b. Bagaimana komunikasi secara sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan?
13. Bagaimana transmisi dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi?

Ada hambatan yang sering muncul dalam tranmisi kebijakan:

 - a. Pertentangan antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan?
 - b. Informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi?
 - c. Persepsi yang selektif dan ketidakmampuan para pelaksana mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan?
14. Bagaiman kejelasan terkait?
 - a. Kompleksitas kebijakan?
 - b. Apakah Ada oposisi dari masyarakat atas kebijakan ini?
15. Bagaimana kejelasan terkait konsistensi perintah-perintah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
16. Bagaimana dengan sumber daya staf (jumlah dan skill) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kebijakan ini?

17. Selanjutnya apakah ada informasi tentang bagaimana melaksanakan kebijakan ini (juklak-juknis)?
18. Bagaimana terkait wewenang yang dibutuhkan oleh pelaksanaan kebijakan?
- kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah yang lain?
 - menyediakan barang dan jasa dalam kebijakan ini?
 - kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, staf dll
 - membawa kasus ke meja hijau,apabilah terjadi pelanggaran kebijakan?
19. Bagaiman terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan reklame dan media informasi?
20. Bagaimana terkait Dispositions(sikap implementor) dan komitmen pelaksana kebijakan?
21. Bagaiamana kaitan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan?
- Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau Standar operating procedure (SOP) yang dipakai?
 - Fragmentasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan?
22. Masalah-masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan kebijakan?
- Data/dokumen yang diperlukan
- ✓ Job Description Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Pejelasananya)
 - ✓ Data administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
 - ✓ TUFOKSI

- ✓ Prosedur Pelayanan
- ✓ SOP
- ✓ Daftar/data yang mengurus izin reklame
- ✓ Data sosialisasi yang pernah dilakukan
- ✓ Data tentang pelaksanaan kebijakan
- ✓ Lampiran/surat-surat

B. Daftar pertanyaan untuk Badan Keuangan Aset Daerah Kab.bantul

1. Bagaimana pandangan BKAD tentang kebijakan/perda penyelenggaraan reklame dan media informasi?
2. Menurut BKAD apakah tujuan dari kebijakan/perda penyelenggaraan reklame dan media informasi?
3. Menurut BKAD kebijakan ini di targetkan kekelompok sasaran seperti apa?
4. Apakah BKAD sebagai salah satu instansi penyelenggara reklame mendapatkan pengarahannya atau diklat tentang kebijakan ini?
5. Terkait jenis yang dikategorikan reklame itu seperti apa?
6. Bagaimana dengan restribusi/biaya yang dikeluarkan untuk satu reklame?
7. Bagaimana tentang penetapan pajak reklame?
8. Bagaimana terkait sumber daya manusia,fasilitas dalam pemungutan pajak reklame ini?
9. Bentuk pelanggaran seperti apa dalam penyelenggaraan reklame?
10. Apakah BKAD sudah mendapatkan pengarahannya perintah-perintah pelaksanaan tentang kebijakan ini?

11. Bagaimana disposisi BKAD dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi?

- Pengangkatan birokratnya ?

12. Dalam penyelenggaraan reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul bekerjasama dengan BKAD

- Bentuk kerjasamanya seperti apa?

13. Apakah ada kewenangan lain BKAD dalam Dalam penyelenggaraan reklame?

- Simisalnya sosialisasi tentang pajak reklame dan media informasi?
- Membawa ke meja hijau apabila terjadi pelanggaran?

14. Apakah menurut BKAD dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat Fragmentasi?

- Data /dokumen

- ✓ Data pajak reklame 2016
- ✓ Data biaya untuk setiap reklamenya
- ✓ Perda yang mengatur tentang reklame

C. Daftar pertanyaan untuk satuan polisi pamong praja(SatpolPP)

1. Bagaimana pandangan SatpolPP tentang kebijakan/perda penyelenggaraan reklame dan media informasi
2. Apakah tujuan dari kebijakan/perda penyelenggaraan reklame dan media informasi?
3. Bagaimana terkait sumber daya manusia,financial dan fasilitas dalam penyelenggaraan reklame ini?
4. Terkait pelaksanaan penyelenggaraan reklame apakah SatpolPP sudah memperoleh kejelasan tugas dalam penertiban,pengawasan dll?
5. Bentuk pelanggaran seperti apa dalam penyelenggaraan reklame?

6. Bagaimana disposisi saptopolPP dalam penyelenggaraan reklame dan media informasi?
7. Dalam penyelenggaraan reklame Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bekerjasama dengan SatpolPP
 - Bentuk kerjasamanya seperti apa?
8. Apakah ada kewenangan lain SatpolPP dalam Dalam penyelenggaraan reklame?
 - Simisalnya sosialisasi tentang reklame dan media informasi?
 - Dan membawak ke meja hijau bila terjadi pelanggaran?

➤ Data/dokumen

Data pelanggaran reklame dikabupaten Bantul?

D. Daftar pertanyaan untuk pemilik/mengurus izin reklame

1. Bagaimana terkait kebijakan penyelenggaraan reklame dan media informasi ini?
2. Bagaimana terkait pelayanan dalam pembuatan izin reklame ini?
 - a. Sudah cukup baik/blum?
 - b. Apakah ada kendala yang dihadapi?
 - c. Bagaimana terkaitat SOP yang dipakai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu apakah sudah cukup cepat?
3. Apakah kelompok sasaran dari kebijakan ini sudah memperoleh sosialisasi dari pihak penyelenggara reklame?